

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Eva Fortuna Kasan

N.I.M.: 205180026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Eva Fortuna Kasan
N.I.M.: 205180026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Eva Fortuna Kasan
N.I.M : 205180026
Program Peminatan Profesi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN MENURUT HUKUM POSITIF
DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)

Disetujui Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eva Fortuna Kasan
NIM : 205180026
Program Peminatan : Hukum Tata Usaha Negara

Judul Skripsi

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SENGKETA
PERTANAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan lulus,
dengan majelis yang terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Pembimbing



Dr. Rasji, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
1. Sifat Penelitian	16
2. Metode Penelitian	16
3. Jenis dan sumber data penelitian.....	16
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Teknis Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Negara Hukum.....	22
B. Teori Kepastian Hukum.....	30
C. Teori Kekuasaan Kehakiman	37
D. Teori Pemerintah yang baik.....	44
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	53
A. Kasus Posisi	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim	73
C. Data hasil penelitian mengenai eksekusi putusan Tata Usaha Negara Nomor 188 PK/TUN/2018	78
BAB IV ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN MENURUT HUKUM POSITIF	

DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)	85
A. Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Eksekusi Sengketa Pertanahan Nomor 188/PK/TUN/2018	85
B. Cara Mengatasi Kendala Eksekusi Atas Putusan Tata Usaha Negara Nomor 188 PK/TUN/2018	94
BAB V	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
A. Buku	111
B. Artikel dan website.....	113

ABSTRAK

(A) Nama: Eva Fortuna Kasan (205180026)

(B) Judul Skripsi: Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pertanahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 188 PK/TUN/2018)

(C) Halaman: v + 114 + lampiran + 2021

(D) Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Eksekusi, Sengketa pertanahan

(E) Isi:

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berada dibawah kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi baik di lingkungan internal Pejabat Tata Usaha Negara maupun perselisihan yang terjadi antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan Individu atau Badan Hukum Perdata. Perselisihan yang sering terjadi antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan Individu atau Badan Hukum Perdata adalah mengenai sengketa pertanahan akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara salah satunya mengenai tumpang tindih hak atas tanah. Akibat dari adanya tumpang tindih hak atas tanah maka perselisihan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan hukum yang tetap, muncul permasalahan tentang banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi. Data Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang lemah mengenai eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya untuk memaksa Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Karena itu, Indonesia perlu merumuskan suatu perundang-undangan baru yang mencakup mengenai peraturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

(F) Acuan:

(G) Pembimbing

Dr. Rasji, S.H., M.H.

(H) Penulis

Eva Fortuna Kasan